

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NUR'AINI

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : ahgaaimayank29@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the financial performance of the city of Samarinda from 2013 until 2015. Analyzer in measuring the effectiveness and efficiency of financial performance of the city of Samarinda by using effectiveness ratio, effectiveness criteria table, efficiency ratio and efficiency criteria table.

The results of research conducted, it is known that the financial performance of the Local Government of Samarinda City from the period of 2013 local government finances Samarinda City is very effective because the effectiveness ratio is greater than 100%. In the period of 2014, the financial performance of Samarinda City Government was less effective because its effectiveness ratio was smaller than 90% and showed a downward trend. In the period of 2015 the regional finances of the Samarinda City Government were also less effective. This is because the effectiveness ratio is smaller than 90% and also indicates a downward trend.

The financial performance of the Local Government of Samarinda City in the period of 2013 if measured by the ratio of the efficiency of local revenue (PAD) is inefficient, this is because the efficiency ratio is greater than 80%. In the period of 2014 the financial performance of Samarinda City Government is less efficient, this is because the efficiency ratio of Samarinda City Government is greater than 80% and shows an increasing trend. While in the period of 2015, the financial performance of Samarinda City Government is also less efficient. This is also caused by the ratio of efficiency of Local Original Income (PAD) is greater than 80% and shows the trend of denial.

Thus it can be concluded that the hypothesis in the period of 2013 for the effectiveness ratio is rejected because the level of effectiveness is greater than 90%, the hypothesis of 2014 accepted because the level of effectiveness is smaller than 90%, while in the period 2015 hypothesis proposed is also accepted because the level of effectiveness more Small than 90%. For the efficiency level in the period of 2013 the hypothesis presented is accepted, this is because the level of efficiency is greater than 80%. In the period 2014, the hypothesis was accepted because the level of efficiency is greater than 80%. And the period of 2015, the hypothesis put forward previously accepted this is also due to the level of efficiency is also greater than 80%

Keywords: Financial Performance, Local Original Income

PENDAHULUAN

Era reformasi, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam UU No.22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No.32 tahun 2004. Keduannya peraturan perundangan tersebut menuntut peran legislatif yang semakin besar dengan kedudukan terpisah dari eksekutif. Pengertian pemerintah berubah yaitu mencakup kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Definisi tersebut memberikan deskripsi yang jelas mengenai pemisahan antara

legislatif dan eksekutif. Kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, bukan lagi kepada presiden. Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat melalui DPRD. Salah satu kewenangan dalam bidang keuangan daerah yang meliputi :

1. Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.

2. Penyelenggaraan, pengurusan, pertanggung jawaban, pengawasan keuangan daerah
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemampuan pemerintah daerah kota samarinda dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Perlu menjadi perhatian sumber pendapatan dari pemerintah pusat tersebut yang dalam bentuk dana perimbangan bobot besarnya adalah dari dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam. Sedangkan bagian daerah dan penerimaan sumber daya alam sektor kehutanan, sektor perikanan dan sektor pertambangan minyak dan gas alam dibagi dengan imbang 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Sumber daya alam ini sebagian besar tidak dapat diperbaharui dan akan habis tentunya dana tersebut tidak dapat kita terima lagi.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kota Samarinda, karena itu Pemerintah Kota Samarinda sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kota Samarinda berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kota Samarinda, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kota Samarinda apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kinerja keuangan daerah Kota Samarinda dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah efektif?
2. Apakah kinerja keuangan daerah Kota Samarinda dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah efisien ?

I. DASAR TEORI

Definisi konseptual yang akan dikemukakan oleh penulis, dibuat agar terdapat batasan-batasan yang jelas antara definisi secara teoritis dan definisi secara konseptual yang berguna untuk memudahkan pembahasan oleh penulis.

Menurut Abdul Halim (2007:23), definisi dari keuangan daerah adalah sebagai berikut : “Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat di jadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku”.

Menurut Darise (2006 : 37) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan dan pembiayaan yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah, Merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Pajak Daerah,

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

- 2) Retribusi Daerah,

Menurut peraturan pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah yang

dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- 3) Hasil perusahaan atau milik daerah, Merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan jenis penerimaan yang termasuk pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset Negara dan jasa giro.
- b. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:
 - 1) Dana Bagi Hasil
 - 2) Dana Alokasi Umum
 - 3) Dana Alokasi Khusus
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Merupakan pendapatan lainnya dari pemerintah pusat atau instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari bantuan dana penyesuaian dan otonomi khusus dari pemerintah dan dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan krisis *solvability*. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari :
 - 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
 - 2) Jasa giro
 - 3) Bunga deposito
 - 4) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
 - 5) Pendapatan denda pajak
 - 6) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - 7) Pendapatan dari pengembalian
 - 8) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
 - 9) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Menurut Mardiasmo (2009:1) mendefinisikan perpajakan adalah sebagai berikut : “Perpajakan adalah sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Mardiasmo (2007:12), mendefinisikan pajak daerah adalah sebagai berikut : “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut Mardiasmo (2009:14) Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi didefinisikan sebagai berikut : “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja keuangan Daerah Kota Samarinda. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Dengan data tersebut dapat diketahui kinerja keuangan Kota Samarinda apakah sudah efektif dan efisien selama periode tersebut.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang dapat diperoleh langsung dari kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran umum Pemerintah Kota Samarinda
2. Struktur Organisasi
3. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kota Samarinda dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015
4. Data lain yang berhubungan

ALAT ANALISIS

Data yang berasal dari APBD akan dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

a. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Mahsun 2006 : 187)

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.1

KRITERIA EFEKTIFITAS KINERJA KEUANGAN

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : depdagri, kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Mahsun 2006 : 189)

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.2

KRITERIA EFISIENSI KINERJA KEUANGAN

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup
60% - 80%	Efisien
dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

III. HASIL PENELITIAN

Kinerja keuangan daerah Pemerintahan Daerah Kota Samarinda kurang baik, dikarena dalam dua tahun yakni dari tahun 2014 sampai tahun 2015 selalu mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio efektivitas, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam dua tahun terakhir yakni pada periode tahun 2014 dan periode tahun 2015 terbukti mengalami peningkatan sedangkan pada periode tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak efisien. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan dengan transparan, jujur, efektif, efisien, dan akuntabel

Berdasarkan dari perhitungann rasio diatas tersebut yang menggunakan rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berikut ini akan dilakukan pembahasan setiap perhitungan rasio-rasio tersebut :

1. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TABEL 5.1

RINGKASAN PERHITUNGAN RASIO EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektifitas
	a	b	(a / b) x 100%
2013	Rp. 338.158.272.078,65	Rp. 286.904.776.836,46	117,86%
2014	Rp. 435.498.980.673,66	Rp. 577.555.670.510,00	75,40%
2015	Rp. 419.745.787.641,01	Rp. 819.500.000.000,00	51,22%

Sumber : data diolah 2016

Pada tabel 5.1 di tersebut atas, dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pemerintah Kota Samarinda dalam periode tahun 2013 sebesar 117,86%, periode tahun 2014 persentasenya lebih rendah sebesar 42,46% (117,86 -75,40%) dari tahun 2013 dan periode tahun 2015 mengalami penurunan lagi yakni sebesar 24,18% (75,40% - 51,22%) dibandingkan dengan periode tahun 2014.

TABEL 5.2

TINGKAT EFEKTIFITAS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Tahun	Rasio Efektifitas	Tingkat Rasio Efektifitas	Tren	Keterangan	
2013	117,86%	> 100%	Sangat Efektif	-	Diterima karena > 90%
2014	75,40%	60% - 80%	Kurang Efektif	Penurunan	Ditolak karena < 90%
2015	51,22%	< 60%	Tidak Efektif	Penurunan	Ditolak karena < 90%

Sumber : data diolah 2016

Pada tabel 5.2 tersebut, dapat dilihat tingkat efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Samarinda periode tahun 2013 sangat efektif yakni lebih besar dari 100% dan hipotesis yang diajukan oleh penulis sebelumnya ditolak karena tingkat efektifitasnya lebih besar dari 90%. Periode tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Samarinda kurang efektif yakni lebih kecil dari 90%, periode tersebut menunjukkan tren penurunan kinerja dibandingkan periode tahun 2013 dan hipotesis yang diajukan oleh penulis sebelumnya diterima. Periode tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Samarinda tidak efektif yakni lebih kecil dari 90% dan juga menunjukkan tren penurunan kinerja dibandingkan dua tahun sebelumnya yakni periode tahun 2013 dan periode tahun 2014 serta hipotesis yang diajukan oleh penulis sebelumnya diterima.

2. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TABEL 5.3
RINGKASAN PERHITUNGAN RASIO EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tahun	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi
	a	b	(a / b) x 100%
2013	Rp. 2.869.579.631.651,84	Rp. 2.567.632.606.693,65	111,76%
2014	Rp. 2.845.036.423.374,66	Rp. 3.201.662.936.936,86	88,86%
2015	Rp. 2.859.356.289.674,01	Rp. 3.238.561.121.093,13	88,29%

Sumber : Data diolah 2016

Pada tabel 5.3 diatas, dapat dilihat bawa rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Samarinda dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu pada periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2014. Periode tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 22.90% (117.76%-88.86%) dari periode

tahun 2013, sedangkan pada peroiden tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0.57% (88.86%-88.29%).

TABEL 5.4
TINGKAT EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Tahun	Rasio Efektifitas	Tingkat Rasio Efisiensi		Tren	Keterangan
2013	111,76%	> 100%	Tidak Efisien	-	Diterima karena > 80%
2014	88,86%	90% - 100%	Kurang Efisien	Peningkatan	Diterima karena > 80%
2015	88,29%	90% - 100%	Kurang Efisien	Peningkatan	Diterima karena > 80%

Sumber : Data diolah 2016

Pada tabel 5.4 tersebut, dapat dilihat tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Samarinda periode tahun 2013 tidak efisien yakni lebih besar dari 100% dan hipotesis yang diajukan oleh penulis sebelumnya diterima karena tingkat afisiennya lebih besar dari 80%. Periode tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Samarinda kurang efisien yakni lebih besar dari 80%, periode tersebut menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode tahun 2013 dan hipotesis yang diajukan oleh penulis sebelumnya diterima. Pada periode tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Samarinda tidak efisien yakni lebih besar dari 80% dan juga menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya yakni periode tahun 2013 dan periode tahun 2014 serta hipotesis yang diajukan oleh penulis sebelumnya diterima.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan daerah Pemerintahan Daerah Kota Samarinda kurang baik, dikarena dalam dua tahun yakni dari tahun 2014 sampai tahun 2015 selalu mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio efektivitas, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
2. Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam dua tahun terakhir yakni pada periode tahun 2014 dan periode tahun 2015 terbukti

mengalami peningkatan sedangkan pada periode tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak efisien. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

b. Saran

Berdasarkan hasil analisis rasio dan uji hipotesis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda serta beberapa kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam rangka meningkatkan kinerja keuangannya, antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kota Samarinda dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja untuk kepentingan manajemen birokrasi pemerintahan serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah.
2. Lebih mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ketergantungan terhadap sumber dana eksternal dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. penerbit Erlangga : Jakarta
- _____, 2006. Peraturan Menteri Daalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Darise, Nurlan. 2008 . *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Indeks : Jakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Manajemen Keuangan Daerah*. Bunga Rampai : Yoygyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* . penerbit ANDI : Yogyakarta
- _____, 2006. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.